



Check for updates

Hubungan Cina-Rusia dalam Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tengah

Sophiana Widiastutie ^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
12450, Jakarta-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Nov 29, 2023

Diterima: Jan 17, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

Central Asia; China; Rusia

KORESPONDEN:

Sophiana Widiastutie

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Email:

Sophianawidiastutie@upnvj.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Widiastutie, S. (2024). Hubungan Cina-Rusia dalam Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tengah. *Journal of Political Issues*. 5(2); 187-195.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.147>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.147>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The Central Asian region was originally part of the Soviet Union's territory which was rich in natural resources, especially oil and natural gas. Apart from that, this region is also very strategic because it is a connecting area between Europe and Asia, as well as between East Asia and the Middle East. After the Soviet Union collapsed in 1991, many large countries were interested in exerting influence in this region. Russia, as the largest country after the disintegration of the Soviet Union, is trying to maintain the influence it inherited from the Soviet Union. The United States is also trying to increase its influence in the region. Apart from that, China, as a neighboring country in the Central Asian region, which is currently a new global actor, also has a high interest in expanding its influence in the Central Asian region. The competition between large countries in the Central Asian region, especially between China and Russia, is what attracted the author to conduct the research written in this article. The author conducted qualitative research with secondary data sources originating from various literature, and used Power Transition theory to analyze relations between China and Russia, especially China's strategy for Russia to jointly protect the Central Asian region from the influence of other global actors. The Shanghai Cooperation Organization is a research boundary set by the author in looking at geopolitical dynamics in Central Asia, apart from the existence of several other points of view which can also be used as research limitations.

The expected finding from this research is how the relationship between China and Russia has a significant geopolitical impact positive for countries in the Central Asian region, thus making countries in the region prefer to remain together with China and Russia in developing their region.

Abstrak Kawasan Asia Tengah semula merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Uni Soviet yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Di samping itu wilayah ini juga sangat strategis karena merupakan wilayah penghubung antara Eropa dan Asia, serta antara Asia Timur dan Timur Tengah. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, banyak negara besar yang tertarik untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah ini. Rusia sebagai negara terbesar setelah hancurnya Uni Soviet berusaha untuk tetap mempertahankan pengaruh yang diwarisi dari Uni Soviet. Amerika Serikat juga berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini. Selain itu, Cina sebagai negara tetangga kawasan Asia Tengah yang saat ini menjadi aktor global baru juga memiliki minat tinggi untuk meluaskan pengaruhnya di wilayah Asia Tengah. Persaingan antara negara besar di kawasan Asia Tengah ini, khususnya antara Cina dan Rusia, yang menarik penulis untuk melakukan penelitian yang dituliskan pada artikel ini. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, serta menggunakan teori Transisi Kekuatan untuk menganalisis hubungan Cina dan Rusia, khususnya strategi Cina pada Rusia untuk secara bersama-sama menjaga kawasan Asia Tengah dari pengaruh aktor global lainnya. Shanghai Cooperation Organization adalah batasan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dalam melihat dinamika geopolitik di Asia Tengah, terlepas dari adanya beberapa sudut pandang lain yang juga dapat dijadikan batasan penelitian.

Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan Cina dan Rusia ini memberi dampak geopolitik yang positif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tengah, sehingga membuat negara-negara di kawasan tersebut lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan Cina dan Rusia dalam mengembangkan wilayah mereka.

TENTANG PENULIS:

Sophiana Widiastutie, Penulis menyelesaikan studi S-3 di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2021, saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta..

PENDAHULUAN

Asia Tengah semula merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Uni Soviet. Di kawasan ini terdapat lima negara yaitu Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, lima negara tersebut memperoleh kemerdekaannya, meskipun pada dasarnya mereka belum benar-benar siap untuk merdeka dan masih banyak bergantung kepada Uni Soviet. Dengan posisi geografis Asia Tengah yang berada di antara Rusia dan Cina, jembatan antara Asia Timur dan Timur Tengah, serta potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadikan kawasan ini sebagai sebuah kawasan strategis yang banyak diminati oleh berbagai kekuatan eksternal dengan berbagai kepentingan, dua di antaranya adalah Rusia dan Cina.

Antara tahun 2001 dan 2013, Asia Tengah secara kompetitif diinkubasi oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Amerika Serikat, setelah peristiwa 9/11, memperluas kemitraan di bidang keamanan dengan negara-negara Asia Tengah. Pada saat yang sama, krisis keuangan global memfasilitasi kebangkitan ekonomi Cina dan penghematan Rusia. Selain itu, Rusia menggunakan strategi “*unite and influence*” yang bertujuan untuk memulihkan kembali pengaruhnya dan memasukkan negara-negara Asia Tengah ke dalam organisasi dan inisiatif regionalnya. Pada tahun 2014, terjadi perubahan geostrategis di kawasan Asia Tengah. Pengaruh Rusia dan Cina semakin menguat di kawasan tersebut, sedangkan Amerika Serikat secara bertahap menarik kehadiran militernya di Afghanistan dan kawasan sekitarnya. Hal ini terutama disebabkan oleh “*ripple effect*” dari ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Selain itu strategi pembangunan *Belt and Road Initiative* (BRI) Cina yang bertujuan membangun kerjasama dan konektivitas di antara negara-negara Eurasia, juga mulai berjalan ke arah yang diharapkan oleh Cina. Cina dan Rusia bekerjasama dalam mendukung tata kelola global pasca-Barat melalui kontak koordinasi di antara badan-badan regional baru seperti *Eurasian Economic Union* (EAEU) dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) (Cooley, Lewis, & Herd, 2022). SCO didirikan pada tahun 2001 dengan negara-negara anggota yaitu Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan. SCO dirancang untuk memfasilitasi kerja sama antar pemerintah di berbagai tingkat yang didukung oleh birokrasi yang berfungsi secara permanen dan terdiri dari perwakilan negara-negara anggota. Ada juga organ yang didedikasikan untuk bidang kegiatan tertentu. Keputusan SCO diambil berdasarkan konsensus dari negara-negara anggotanya (Aris, 2013).

Dengan memperhatikan dinamika hubungan antara Cina dan Rusia, khususnya di kawasan Asia Tengah, maka dalam artikel ini penulis tertarik untuk menganalisis hubungan Cina, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah dengan batasan penelitian pada lingkup SCO serta menggunakan alat analisis Teori Transisi Kekuatan (*The Power Transition theory*). Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan Cina dan Rusia ini memberi dampak geopolitik yang positif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tengah, sehingga membuat negara-negara di kawasan tersebut lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan Cina dan Rusia dalam mengembangkan wilayah mereka.

LANDASAN TEORITIK**Teori Transisi Kekuatan (*The Power Transition theory*)**

Teori Transisi Kekuatan (*The Power Transition Theory*) pertama kali disampaikan oleh A. F. K. Organski pada tahun 1958. Model transisi kekuasaan menggambarkan sistem

internasional dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Transisi Kekuatan mencerminkan tiga asumsi mendasar yang tertanam dalam sudut pandang realis tentang politik dunia. Pertama, sistem internasional telah dipahami sebagai sebuah dunia yang diatur oleh sedikit aturan, atau sebuah dunia yang berada dalam keadaan anarki sebagian atau seluruhnya. Transisi kekuasaan memandang tatanan internasional tidak bersifat anarkis sama sekali, melainkan terorganisir secara hierarkis dengan cara yang mirip dengan sistem politik dalam negeri. Para aktor menerima posisi mereka dalam tatanan internasional dan mengakui pengaruhnya berdasarkan perbedaan dalam distribusi kekuasaan di berbagai negara. Asumsi yang berbeda secara mendasar ini memisahkan transisi kekuasaan dari model realis sebelumnya. Kedua, transisi kekuasaan memandang bahwa peraturan yang mengatur sistem politik domestik dan internasional pada dasarnya serupa. Meskipun tidak adanya aturan hukum internasional yang dapat ditegakkan, tidak ada perbedaan besar dalam peraturan yang mengatur arena domestik dan internasional. Bangsa-bangsa, seperti kelompok politik dalam sistem domestik, selalu berada dalam persaingan atas sumber daya yang langka di tatanan sistem internasional. Ketiga, transisi kekuasaan memahami persaingan internasional didorong oleh potensi keuntungan bersih yang dapat diperoleh dari konflik atau kerja sama. Tujuan negara-negara, sebagaimana dikemukakan dalam teori keseimbangan kekuasaan (Tammen, 2008), bukanlah untuk memaksimalkan kekuasaan; sebaliknya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan bersih. Persaingan damai terjadi ketika para pihak sepakat bahwa keuntungan bersih dari konflik lebih rendah dibandingkan keuntungan bersihnya; konflik muncul ketika yang terjadi justru sebaliknya (Organski, 1968; Kugler & A.F.K.Organski, 1989).

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui data yang sudah ada seperti buku, jurnal artikel ilmiah nasional maupun internasional, media internet, laman resmi yang kredibel, surat kabar, buletin, serta analisis data dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik artikel ini, sebagai sumber utama penulisan. Obyek yang diteliti adalah hubungan antara Cina, Rusia, dan negara-negara di Asia Tengah pasca runtuhnya Uni Soviet, dalam sebuah organisasi yang bernama Shanghai Cooperation Organization (SCO).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasca runtuhnya Uni Soviet, kawasan Asia Tengah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam, serta merupakan wilayah strategis yang menghubungkan Eropa dan Asia, Asia Tengah dan Timur Tengah, menjadi sebuah kawasan yang menarik minat negara-negara besar untuk mendapatkan keuntungan, sehingga negara-negara hegemon tersebut berlomba-lomba untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Amerika Serikat tertarik pada Asia Tengah selain karena letak geostrategisnya yang menguntungkan dan sumber daya alamnya yang melimpah, juga karena masalah Afghanistan yang secara geografis dekat dengan kawasan Asia Tengah, sehingga Amerika Serikat harus mengamankan kepentingannya di Afghanistan dengan memberikan perhatian lebih pada Asia Tengah. Tetapi strategi yang dikembangkan Amerika Serikat untuk Asia Tengah tahun 2019-2025 tidak lagi tepat untuk diterapkan pada situasi saat ini. Amerika Serikat harus membuat kebijakan baru untuk Asia Tengah dalam menghadapi pengaruh Rusia dan Cina di kawasan ini. Jika tidak, sulit bagi Amerika Serikat untuk mendorong kepentingannya di Asia Tengah (Yunusov, 2023).

Rusia sebagai negara terbesar setelah Uni Soviet runtuh, mewarisi pengaruh Uni Soviet atas negara-negara bekas wilayah Uni Soviet lainnya. Tetapi di Asia Tengah, Rusia tidak lagi menjadi hegemon regional. Kebangkitan Cina telah menggeser kedudukan Rusia sebagai

kekuatan ekonomi utama di kawasan ini. Di masa lalu Rusia memandang Asia Tengah sebagai kawasan paling stabil. Rusia secara teratur memberikan pengaruh dan tekanan politik terhadap para pemimpinnya, tetapi pengaruh Rusia di Asia Tengah semakin melemah, meskipun hubungan Rusia relatif tidak berubah dengan lima negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, yaitu: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Stabilitas kawasan di Asia Tengah menjadi sedikit memanas, ketika terjadi beberapa ketegangan antara Rusia dan negara-negara Asia Tengah, seperti terjadinya Revolusi Tulip tahun 2005 di Kyrgyzstan yang dikecam Rusia sebagai “revolusi warna” yang didukung Barat, penggantian Rusia sebagai jalur ekspor gas utama oleh Turkmenistan dengan jalur pipa Cina-Asia Tengah, dan perselisihan berulang dengan mendiang diktator Uzbekistan, Islam Karimov yang sebelum kematiannya pada tahun 2016 merupakan orang yang paling terkemuka di Asia Tengah. Begitu juga dengan kekacauan yang terjadi di Kazakhstan pada Januari 2022 karena adanya unjuk rasa besar-besaran yang disebabkan oleh kenaikan harga gas. Pada peristiwa ini Rusia berhasil membantu Kazakhstan meredakan kekacauan tersebut, dan Cina mendukung tindakan Rusia (Hess, 2023).

Pengaruh Rusia juga berkurang di Uzbekistan, negara berpenduduk terpadat di Asia Tengah (Yilamu, 2018). Uzbekistan secara perlahan telah berhasil mengubah diri dari negara tertutup menjadi negara dengan ekonomi yang lebih liberal, menyambut investor asing dari Rusia tetapi juga Barat. Tahun lalu Uzbekistan mengalami kerusuhan yang mengejutkan ketika ada upaya pimpinan negara untuk merombak konstitusi (Yilamu, 2018). Banyak pihak yang berpendapat bahwa Rusia terlibat dalam kerusuhan tersebut, tetapi pemerintah Uzbekistan dapat meredakan kerusuhan tersebut tanpa bantuan Rusia. Di Tajikistan dan Kyrgyzstan, yang secara tradisional merupakan dua negara di kawasan Asia Tengah yang paling bergantung pada Moskow, pengaruh Rusia juga tidak sama seperti Uni Soviet di masa lalu. Kyrgyzstan pernah berupaya menyeimbangkan pengaruh Rusia dengan mengembangkan hubungan dengan negara-negara Barat, tetapi negara tersebut tetap berada pada jalur yang lebih dekat dengan Rusia (Ortmann, 2018). Demikian pula Tajikistan, yang pernah agak jauh dari Rusia ketika pasukan Amerika Serikat (AS) berada di Afghanistan, tetapi kembali dekat ke Rusia, pada saat pasukan AS ditarik dari Afghanistan tahun 2021. Perselisihan antara Tajikistan dan Kyrgyzstan sering terjadi disebabkan oleh masalah perbatasan. Rusia yang biasanya menjadi penengah dari kedua negara tersebut, sejak melakukan invasi ke Ukraina menjadi kurang memberikan perhatian pada permasalahan Tajikistan dan Kyrgyzstan.

Turkmenistan adalah salah satu negara di wilayah Asia Tengah yang berusaha untuk netral dan tidak tergabung dalam organisasi apapun yang dipimpin oleh Rusia. Sebelum konflik di Ukraina, Rusia mencoba mendekati Turkmenistan dengan memberikan landasan ekonomi baru bagi hubungan dengan Turkmenistan melalui cara pembelian gas Turkmenistan. Namun Rusia sekarang menghadapi kelebihan pasokan gas dari gasnya sendiri, sehingga kecil kemungkinan Rusia akan membeli banyak gas dari Turkmenistan. Sebaliknya, Turkmenistan memiliki gagasan untuk membangun jalur trans-Kaspia yang menyalurkan gasnya ke Barat melalui Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Turki, yang posisi strategisnya terhadap Rusia meningkat pesat akibat serangan Rusia terhadap Ukraina, mendukung gagasan tersebut meskipun hal ini tidak menjamin bahwa proyek pipa tersebut akan terwujud, karena Rusia masih memiliki hak veto berdasarkan Konvensi Status Hukum Laut Kaspia tahun 2018. Gagasan Turkmenistan kemungkinan tidak akan diwujudkan, karena masih ada keraguan bahwa pemerintah Turkmenistan akan bertindak cukup jauh dalam menjangkau Barat. Turkmenistan lebih memilih untuk bersikap seperti yang dilakukan saat ini, yaitu tetap bersikap netral. Geografi kawasan Asia Tengah membuat negara-negara di kawasan ini tidak dapat sepenuhnya menjauh dari Rusia, namun Rusia tidak melakukan peran hegemon seperti yang ditunjukkan oleh Uni Soviet dahulu, dan tidak pula tampak akan melakukan hal seperti Uni Soviet. Tidak adanya hegemon regional di kawasan Asia Tengah dapat menyebabkan timbulnya gejala yang membahayakan kawasan itu sendiri.

Bahaya tersebut kemungkinan disadari oleh Cina, sebagai tetangga kawasan Rusia dan Asia Tengah. Rusia dan Cina bertetangga, dengan sejarah hubungan yang kontroversial, dan dalam aspirasi mereka untuk menciptakan tatanan internasional non-Barat, mereka bukan hanya mitra tetapi juga pesaing. Dualitas ini tidak muncul secara lebih terbuka selain di Asia Tengah, wilayah yang secara tradisional didominasi oleh Rusia namun semakin menjadi bagian dari pengaruh Cina. Meskipun demikian Cina memberikan ruang kepada Rusia untuk tetap menjadi aktor politik unggulan di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar stabilitas kawasan di Asia Tengah tetap terjaga. Simbiosis mutualistis antara Rusia dan Cina merupakan gabungan strategi yang ada pada teori Transisi Kekuatan. Rusia dengan secara terbuka menantang kepemimpinan AS, sehingga dengan sikap itu Rusia telah mengalihkan perhatian AS dari ancaman Cina yang baru muncul, dan Cina bebas berkonsentrasi pada kebangkitannya secara damai.

Dalam teori Transisi Kekuatan (*the Power Transition Theory*), strategi Cina tersebut memenuhi tiga asumsi dasar teori Transisi Kekuatan. Pertama, Cina memahami bahwa sistem internasional tidak sepenuhnya bersifat anarkis, melainkan terorganisir secara hierarkis. Cina juga memahami posisi para aktor dalam tatanan internasional dan mengakui pengaruhnya berdasarkan perbedaan dalam distribusi kekuasaan di berbagai negara. Kedua, Cina juga telah memperhitungkan bahwa negaranya dan negara-negara besar lainnya selalu berada dalam persaingan atas sumber daya yang langka di tatanan sistem internasional. Oleh karena itu maka pada asumsi ketiga, Cina berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan cara bermitra dibandingkan melakukan konflik secara terbuka dengan pesaingnya (Lim, 2014; Kim & Gates, 2015).

Cina sendiri memiliki keunikan sebagai kekuatan yang sedang berkembang, karena populasinya yang sangat besar serta pengaruh sejarah dan budayanya. Bagi Cina, strategi kebijakan luar negeri yang paling logis adalah menekankan sifat kebangkitannya yang damai dan tidak mengancam dengan menghindari keterlibatan asing yang dapat mengakibatkan konflik dengan negara-negara besar lainnya. Dengan cara ini Cina dapat fokus pada pembangunan internalnya dan memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari tatanan hegemonik Amerika Serikat, yang pada dasarnya akan mempercepat jalan Cina menuju keunggulan global. Hal ini telah menjadi kebijakan Cina hampir sepanjang periode pasca-Mao, seperti yang dicontohkan oleh diktum Deng Xiaoping tentang “*tao guang yang hui*” atau “sembunyikan kekuatanmu dan tunggu waktumu”, yang bertujuan untuk menjamin lingkungan internasional yang damai bagi pembangunan internal Cina dengan mengadopsi pendekatan *low key* dalam urusan internasional. Dengan melaksanakan diktum ini, Cina dapat meyakinkan negara-negara Barat dan negara-negara tetangga Cina akan sifat baik hati dari kebangkitan Cina, sehingga alih-alih menyeimbangkan kekuatan Cina yang semakin besar, negara-negara tersebut justru akan berpartisipasi aktif dalam kelanjutan pembangunan ekonomi dalam negeri Cina (Krickovic, 2017).

Di Asia Tengah, salah satu strategi yang dilakukan Cina adalah menjalin kerjasama melalui pembentukan sebuah organisasi regional yaitu *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) (Ya-Mei, & Makengo, 2021). Bermula pada pertemuan para kepala lima negara atau dikenal dengan sebutan *The Shanghai Five*, yaitu: Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, pada bulan April 1996 untuk mengatasi masalah pengelolaan perbatasan, meningkatkan kerja sama lintas batas, dan mendorong langkah-langkah membangun kepercayaan, pada bulan Juni 2001, lima negara ditambah dengan Uzbekistan mendirikan SCO dan mengeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa mereka berjanji untuk bekerja sama meningkatkan keamanan dan stabilitas bersama di wilayah mereka. Pada tahun 2003, pusat kontraterorisme gabungan didirikan di Shanghai; pada tahun 2004, sebuah Struktur Anti-Terrorisme Regional didirikan di Tashkent; dan pada tahun 2006, anggota SCO sepakat mendirikan lembaga baru untuk memerangi kejahatan transnasional. Selain itu, anggota SCO

telah melakukan beberapa latihan militer; berjanji untuk meningkatkan kerja sama ekonomi; memiliki tujuan akhir untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas; dan membentuk dewan antar bank untuk mendanai proyek pembangunan di masa depan.

Cina dan Rusia memandang organisasi ini sebagai sarana yang berguna untuk menjalin kerja sama politik regional yang lebih besar, namun dengan cara yang cenderung membatasi peran dan pengaruh pihak luar dalam urusan Asia Tengah. SCO telah memberikan status pengamat kepada India, Iran, Pakistan, dan Mongolia, namun menunda perluasan keanggotaan baru. Isu kontroversial mengenai potensi keanggotaan Iran merupakan sumber peluang bagi Cina dan Rusia untuk menunjukkan kemampuan mereka menantang dominasi global AS, sekaligus menjadi gangguan, karena memberikan Iran keanggotaan penuh dapat menjadi hal yang lebih mengganggu hubungan dengan AS dan negara-negara yang tidak diinginkan oleh Rusia maupun Cina (Plater-Zyberk & Monaghan, 2014).

Melalui kerjasama SCO, Cina dan Rusia bersama-sama menjaga wilayah Asia Tengah agar pihak AS dan kelompoknya tidak dapat semakin kuat mempengaruhi negara-negara di kawasan tersebut. Kawasan Asia Tengah penting bagi Rusia dan Cina, baik dalam hal kepentingan regional maupun global. Kehadiran militer AS di Afghanistan membuat Rusia dan Cina merasa tidak nyaman tetapi sekaligus memberikan keuntungan karena fakta kehadiran militer AS di wilayah tersebut membawa konsekuensi Afghanistan dan Asia Tengah yang lebih stabil. Baik Rusia maupun Cina tidak pernah benar-benar menyambut kehadiran AS di Asia Tengah atau memfasilitasinya secara signifikan. Sebagai bekas bagian dari kekuatan besar di Asia Tengah, Rusia secara khusus berpendapat bahwa kepentingannya akan terlayani dengan baik jika dapat “menyeimbangkan” kehadiran AS, dan SCO dianggap sebagai organisasi keamanan yang siap melawan kehadiran AS serta sebagai faktor kunci dalam urusan keamanan regional (Manurung, 2019).

Melalui kerjasama di SCO juga, kepentingan Rusia dan Cina secara sendiri-sendiri mendapatkan manfaatnya. Rusia mempunyai kepentingan besar untuk menjaga Asia Tengah tetap stabil dan bebas dari unsur-unsur radikal, mengingat perbatasan yang panjang dan tidak aman yang dimiliki Rusia dengan Asia Tengah.. Selain stabilitas dan keamanan, Rusia memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Asia Tengah. Perekonomian kawasan ini masih terkait erat dengan perekonomian Rusia sebagai warisan peninggalan Uni Soviet yang masih dapat bertahan karena faktor tradisi, geografi, pengaturan transportasi, dan teknologi. Sedangkan kepentingan Cina di Asia Tengah, selain dalam bidang ekonomi juga bidang keamanan. Kawasan Asia Tengah berbatasan dengan provinsi barat Cina, tempat kelompok separatis Uyghur yang telah lama menentang kedaulatan Cina. Pecahnya Uni Soviet, menurunnya kekuatan Rusia, dan destabilisasi kawasan yang diakibatkannya pasti merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Cina. Meskipun besar, kepentingan Cina di Asia Tengah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kepentingan Cina di Timur, seperti di Taiwan, hubungan dengan Korea Utara, Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Dengan strateginya untuk mengamankan provinsi-provinsi baratnya yang jelas bertumpu pada pilar-pilar pembangunan ekonomi domestik dan asimilasi etnis, Cina tampak lebih cenderung menyerahkan keamanan Asia Tengah kepada Rusia dan Amerika Serikat, sambil memperluas hubungan ekonominya di wilayah tersebut. Hasil dari ekspansi tersebut mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, ketika Cina muncul sebagai pemain utama dalam energi di Asia Tengah (Li, Dongchen, & Kolotova, 2020).

Meskipun SCO dianggap sebagai organisasi regional yang berhasil, namun SCO tetap memiliki beberapa masalah di dalamnya, antara lain perselisihan mengenai perbatasan antar negara-negara anggotanya. Masalah perbatasan ini mendapat perhatian besar dari SCO yang salah satu upayanya adalah pembuatan demarkasi secara serempak di seluruh negara anggota dengan maksud untuk mencegah penyeberangan perbatasan. Tetapi di sisi lain demarkasi ini juga mengurangi efektifitas perdagangan dan justru meningkatkan ketegangan. Sebagai contoh permasalahan perbatasan Kyrgyzstan-Uzbekistan yang terjadi pada tahun 2016 dan munculnya

bentrok perbatasan antara Tiongkok dan India yang terjadi pada bulan Juni 2020 (Maulaya, 2021). Di samping itu, kesenjangan kekuatan antara Cina-Rusia dengan negara-negara Asia Tengah menyebabkan banyak inisiatif yang dihasilkan tidak dapat diterapkan dengan baik karena sumber daya yang tersedia untuk mendukung inisiatif-inisiatif tersebut dan kemampuan negara-negara anggota untuk menerapkan inisiatif masih belum pasti. Kecuali Cina dan Rusia, Negara-negara anggota SCO hanya mempunyai sedikit sumber daya dan kemampuan untuk mengambil tindakan di bidang keamanan regional atau pembangunan ekonomi. Dengan demikian, organisasi ini masih sangat bergantung pada dua anggota utamanya untuk mengembangkan kemampuan tersebut (Bailes, 2007).

Dan yang lebih berbahaya bagi kelangsungan kerjasama di SCO adalah konflik kepentingan antara Cina dan Rusia dalam kerja sama energi. Meskipun Cina dan Rusia mempunyai komitmen yang sama untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di Asia Tengah, Rusia tetap gigih mempertahankan kendalinya atas sumber daya tersebut dan juga infrastruktur transportasi di kawasan. Dalam posisi yang kontradiktif dengan Rusia untuk mendapatkan kontrol yang lebih luas, Cina ingin melakukan pengawasan langsung terhadap aset-aset energi regional. Kepentingan lain yang bertolak belakang antara kedua negara adalah mengenai mekanisme SCO dalam mengelola kerja sama energi. Rusia mempunyai keinginan besar untuk membangun blok energi multilateral yang bersatu untuk SCO, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan energi milik negara untuk mendominasi. Di sisi lain, Cina mengupayakan kesepakatan bilateral yang memungkinkan mereka mengalihkan minyak dan gas Asia Tengah ke arah timur dibandingkan ke Rusia. Kepentingan lintas sektoral antara Cina dan Rusia telah membuat SCO hanya mempunyai sedikit ruang untuk memaksimalkan potensinya di bidang energi (Krickovic, 2017).

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut masa depan SCO sangat bergantung pada hubungan antara Cina dan Rusia dan ke mana kedua pemain utama ini ingin membawa organisasi ini. Beberapa keputusan di masa depan yang diambil oleh SCO mungkin penting bagi kawasan, namun yang diambil secara bilateral oleh Cina dan Rusia akan menjadi sangat penting (Rumer, 2006). Pada saat yang sama, SCO menyediakan wahana bagi Rusia dan Cina untuk bekerja sama satu sama lain dan mengamati aktivitas masing-masing di bidang kepentingan bersama di Asia Tengah, di samping untuk mengawasi kehadiran AS dan negara-negara Barat lainnya di wilayah strategis mereka (Bossuyt, 2021).

SIMPULAN

Kawasan Asia Tengah, yang memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi geografis yang strategis, secara historis merupakan bagian dari Uni Soviet di masa lalu, dan secara geografis berdekatan dengan Cina. Runtuhnya Uni Soviet, di samping menjadi sebuah kesempatan bagi negara-negara Asia Tengah untuk lebih bebas mengarahkan tujuan negaranya, juga menjadi ancaman karena hilangnya negara hegemon dapat menyebabkan kerawanan dan ketidakstabilan keamanan di wilayah tersebut. Cina dengan strategi mengedepankan kemitraan dibanding konflik dengan pesaing, menginisiasi berdirinya sebuah organisasi regional yaitu *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) yang beranggotakan Cina, Rusia, dan negara-negara di Asia Tengah. Bersama dengan Rusia, Cina berusaha melindungi wilayah Asia Tengah agar terhindar dari masuknya pengaruh AS yang selalu berdalih untuk mendorong demokrasi. Meskipun kekuatan Rusia saat ini sudah menurun, dan sebaliknya Cina semakin meningkat, di wilayah Asia Tengah ini Cina mendukung Rusia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya dan secara tegas menentang kehadiran AS di wilayah tersebut. Meskipun secara umum SCO dikatakan sebagai organisasi regional yang sukses, secara internal masih banyak permasalahan yang terjadi di antara anggotanya. Terutama persaingan antara Cina dan Rusia di bidang energi. Tetapi sepanjang Cina dan Rusia masih memiliki kepentingan untuk secara

bersama mempertahankan pengaruh di Asia Tengah, maka pertentangan diantara negara-negara anggota SCO dapat dikatakan tidak membahayakan kelangsungan SCO itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, S. (2013). *Shanghai Cooperation Organization Mapping Multilateralism in Transition* No. 2. Vienna: International Peace Institute.
- Bailes, Alyson J.K. & Pal Dunay. (2007). *The Shanghai Cooperation Organization as a regional security institution*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Bossuyt, Fabiennne & Marcin Kaczmarek (2021). *Russia and China between cooperation and competition at the regional and global level. Introduction*. Eurasian Geography and Economics, 62:5-6, 539-556.
- Cooley, A., Lewis, D., & Herd, G. P. (2022). Russia and China in Central Asia. *George C. Marshall European Center for Security Studies*.
- Hess, M. (2023). Russia Is Down But Not Out, in Central Asia. *Foreign Policy Research Institute*.
- Kim, W., & Gates, S. (2015). Power transition theory and the rise of China. *International Area Studies Review*, 18(3), 219–226. <https://doi.org/10.1177/2233865915598545>
- Krickovic, A. (2017). The Symbiotic China-Russia Relationship: Cautious Riser and Desperate Challenger. *The Chinese Journal of International Politics*, 10(3), 299-329. <https://doi.org/10.1093/cjip/pox011>
- Kugler, J., & A.F.K.Organski. (1989). *The Power Transition: A Restrospective and Prospective Evaluation*. Michigan: Michigan Press.
- Li, Wang, Zhou Dongchen, and Anna Kolotova (2020). *China and Russia in the SCO: Consensus & Divergence*. Human Affairs, Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences, 189–198.
- Lim, Y. (2014). How (Dis)Satisfied is China? A power transition theory perspective. *Journal of Contemporary China*, 24(92), 280–297. <https://doi.org/10.1080/10670564.2014.932160>
- Manurung, R. (2019). Russia-China Strategic Partnership in the Indo-Pacific Region: Synergizing Greater Eurasia With Belt And Road Initiative, 2016-2018. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.1033>
- Maulaya, M. (2021, May 24). Barriers for Shanghai Cooperation Organization (SCO) to Pave Road to Supranationalism. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2), 230. <https://doi.org/10.24198/intermestic/v5n2.4>.
- Organski, A.F.K. (1968). *World Politics* 2d ed. New York: Knopf.
- Ortmann, S. (2018). Beyond spheres of influence: the myth of the state and Russia's seductive power in Kyrgyzstan. *Geopolitics*, 23(2), 404–435. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1451843>

- Plater-Zyberk, H., & Monaghan, A. (2014, August 1). *Strategic Implications of the Evolving Shanghai Cooperation Organization*. <https://doi.org/10.21236/ada608837>
- Rumer, E. B. (2006). China, Russia, and the Balance of Power in Central Asia. *Strategic Forum, Institute for National Strategic Studies National Defense University*.
- Tammen, R. (2008, October). The Organski Legacy: A Fifty-Year Research Program. *International Interactions*, 34(4), 314–332. <https://doi.org/10.1080/03050620802561769>
- Ya-Mei, X., & Makengo, B. M. (2021). Twenty years of the Shanghai Cooperation Organization: Achievements, challenges and Prospects. *Open Journal of Social Sciences*, 09(10), 184–200. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.910014>
- Yilamu, W. (2018). *Neoliberalism and Post-Soviet Transition: Kazakhstan and Uzbekistan*. London: Palgrave Macmillan Cham.
- Yunusov, S. (2023). Recent Updates in US-Central Asia Relations: The Consequences of the US Withdrawal from Afghanistan and the Need for a New Strategy . *International Journal of Education, Vocational, and Social Science*, 1-8.
- .